

RENCANA KERJA BKPSDM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2027



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURBALINGGA

Alamat : Jl. Jenderal Soedirman No.175
Telepon : 891334 Faximile : (0281) 6597252,
email : bkd@purbalingga.go.id
PURBALINGGA

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan Program/Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu Renja BKPSDM ini menjadi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Rancangan Awal Renja BKPSDM Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan periode tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Tahun 2025-2029 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Purbalingga.

Renja BKPSDM Tahun 2027 disusun sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 yang menggambarkan Perencanaan Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif. Melalui Renja Tahun 2027 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat Program/Kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Purbalingga, 26 Januari 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURBALINGGA,



DWI MULYATNO, S. Pd, M. Kes.
Pembina Tk.I
NIP. 19700426 200903 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	lii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
2.1 Landasan Hukum	1
3.1 Maksud dan Tujuan	3
4.1 Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM TAHUN 2024	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2024 dan Capaian Renstra BKPSDM	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM	16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, BKPSDM	31
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM	32
3.3 Program dan Kegiatan.....	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM.....	35
BAB V. PENUTUP	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (RENJA BKPSDM) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja BKPSDM merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM sehingga penyusunan Renja BKPSDM berpedoman pada Renstra BKPSDM dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA BKPSDM mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program urusan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Purbalingga, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi, misi, dan program PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA–PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2027;
3. RENJA PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja BKPSDM.

Penyusunan Renja mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra, hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program, kegiatan serta sub kegiatan yang berasal dari Masyarakat, Renja BKPSDM Tahun 2027 merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi pembangunan yang termuat dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2027. Selanjutnya Renja BKPSDM Tahun 2027 ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan RAPBD yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDM Tahun 2027.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RENJA BKPSDM Tahun 2027 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Reppublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pemabangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

- Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 145);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 144)
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 114);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);
 16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 63);
 17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga;

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2027 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Tahun 2027 dan perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDM Kabupaten Purbalingga.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Tahun 2027 ini adalah :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, subkegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan BKPSDM tahun 2027;

2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2027 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga Tahun 2027

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan RENJA BKPSDM Tahun 2027 meliputi:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM TAHUN 2024

Bab II ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra BKPSDM, Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM, Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi BKPSDM, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Tahun 2025 dan Capaian Renstra BKPSDM.

1. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2024 sebesar Rp. 6.947.739.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 pada BKPSDM Kabupaten Purbalingga tercantum pada tabel berikut ini :

**Tabel 2. 1 Laporan Realisasi Anggaran
BKPSDM Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025
(Kondisi s.d. 31 Desember 2025)**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Jumlah Total	6.947.739.000	6.475.825.548	93,21
	Urusan Kepegawaian	6.909.309.000	6.437.420.848	93,17
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.754.217.000	5.399.626.744	93,84
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.750.000	1.731.000	98,91
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	490.000	480.000	97,96
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.260.000	1.251.000	99,29
2	Administrasi Keuangan	5.389.933.000	5.051.325.150	93,72
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.330.673.000	4.992.581.650	93,66
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.500.000	21.983.500	97,70
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36.760.000	36.760.000	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.900.000	3.900.000	100,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.900.000	3.900.000	100,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	7.296.000	72,96
	Pendidikan dan Pelatihan Kepegawai berdasarkan tugas dan fungsi	10.000.000	7.296.000	72,96
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.108.000	26.581.950	98,06
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.627.000	1.616.500	99,35
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.182.000	13.755.450	96,99
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.140.000	1.080.000	94,74
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.250.000	3.225.000	99,23
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.309.000	3.305.000	99,88
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.600.000	3.600.000	100,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.850.000	6.850.000	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.850.000	6.850.000	100,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	172.291.000	164.432.444	95,44
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	415.000	8.000	1,93
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.820.000	94.758.106	93,06
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.056.000	69.666.338	99,44
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.385.000	137.510.200	96,58

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan	131.020.000	126.411.200	96,48
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5.730.000	5.475.000	95,55
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.635.000	5.624.000	99,80
II	KEPEGAWAIAN DAERAH	1.155.092.000	1.037.794.104	89,85
9	Pengadaan, Pemberhentian dan Infomasi Kepegawaian ASN	283.153.000	194.433.264	68,67
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	194.513.000	106.202.541	54,60
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	80.341.000	80.049.723	99,64
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4.709.000	4.655.000	98,85
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.590.000	3.526.000	98,22
10	Mutasi dan Promosi ASN	375.974.000	368.975.306	98,14
	Pengelolaan Mutasi ASN	146.974.000	142.480.056	96,94
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12.500.000	12.392.400	99,14
	Pengelolaan Promosi ASN	216.500.000	214.102.850	98,89
11	Pengembangan Kompetensi ASN	403.638.000	388.086.134	96,15
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	12.630.000	12.599.600	99,76
	Pengelolaan Assesment Center	59.025.000	58.811.234	99,64

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.000.000	386.000	38,60
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	328.901.000	314.234.500	95,54
	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	487.000	460.800	94,62
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	1.595.000	1.594.000	99,94
12	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	92.327.000	86.299.400	93,47
	Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9.020.000	8.265.050	91,63
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	69.865.000	64.632.850	92,51
	Pembinaan Disiplin ASN	10.582.000	10.570.500	99,89
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	2.860.000	2.831.000	98,99
	Urusan Pendidikan dan Pelatihan			
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	38.430.000	38.404.700	99,93
13	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	38.430.000	38.404.700	99,93
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	38.430.000	38.404.700	99,93

Berdasarkan tabel di atas realisasi anggaran BKPSDM di Tahun 2025 adalah sebesar 93,21 % adapun Kegiatan yang capaiannya dibawah 80 % adalah:

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN sebesar 54,60 % hal ini karena pada Sub Kegiatan ini

yang semula menganggarkan beasiswa Pembibitan PKN STAN berupa biaya pendidikan dan biaya asrama untuk 4 orang calon mahasiswa, dalam realisasinya hanya 2 orang calon mahasiswa yang lolos seleksi, sehingga anggaran beasiswa hanya diberikan untuk 2 orang calon mahasiswa.

2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi hanya terealisasi sebesar 72,96 %. Hal ini terjadi karena hampir semua jenis pengembangan kompetensi yang diikuti oleh ASN BKPSDM dilaksanakan secara daring dan tidak berbayar. Serta Efisiensi di skala nasional sehingga tidak ada tawaran diklat pada kementerian/Lembaga dan instansi vertikal lainnya.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat hanya terealisasi sebesar 1,93 % karena pada saat ini persuratan lebih banyak menggunakan media elektronik.

2. Capaian Renstra BKPSDM

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2026 sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra BKPSDM s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)
Kabupaten Purbalingga

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Indeks Profesionalitas ASN	82	79,38	81	81,11	100,13	81	81,25	100
		Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	0,7	0,63	0,64	0,73	114,06	0,64	0,64	100
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kualifikasi merit system, aspek perencanaan, pengadaan, sistem informasi	0,20	0,17	0,18		94,44	0,18	0,18	100
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah nilai merit system aspek perencanaan, pengadaan, sistem informasi	74	67	69		100	69	69	100
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan Pengadaan ASN	JUmlah dokumen hasil Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan Pengadaan ASN	4 dok	-	4 dok	2	40			
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	500 dok	500 dok	50 dok	2836	5672	50 dok	500 dok	100
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	303 dok	374 dok	400 dok	359	89	400 dok	341 dok	100

5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 dok	4 dok	100 dok	100	100	100 dok	4 dok	100
	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kualifikasi merit system, aspek mutasi, rotasi, promosi	0,04	0.06	0,02		128	0,06	0,06	100
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah nilai merit system aspek mutasi, rotasi, promosi	29	26	27		118.18	23	27	100
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan administrasi, Jabatan Pelaksanan dan Mutasi ASN Antar Daerah	100 dok	204 dok	50 dok	65	130	300 dok	75 dok	100
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 dok	1584 dok	800 dok	1005	125	800 dok	800 dok	100
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	60 dok	60 dok	40 dok	425	850	50 dok	55 dok	100
	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kompetensi merit system, aspek pengembangan karir	0,22	0.19	0,20		120	0,20	0,20	100
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah nilai merit system aspek pengembangan karir	86	77	79		84	78	80	100
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya	50 org	13 org	100 org	100	100	100 org	50 org	100
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	35 dok	82 dok	30 dok	30	100	30 dok	30 dok	100
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	6 org	7 org	6 org	0	0	6 org	6 org	100
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan kerjasama Pelaksanaan Diklat	22 dok	20	18 dok	11	61	18 dok	20 dok	100
5.03.02.2.03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1Laporan	1 laporan	1 Laporan	20	100	20 Laporan	1 Laporan	100
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	100 org	328	50 org	97	194	50 org	100 org	100
	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kinerja dan Indeks Disiplin merit system, aspek manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan	0,26	0.22	0,24		128	0,24	0,24	100

5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah nilai merit system aspek manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan	97	87	90		117,57	62	90	100
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10 dok	50 dok	100 dok	100	100	90 dok	10 dok	100
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	130 org	6 org	6 org	6	100	6 org	130 org	100
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	5 org	22 org	10 org	7	70	10 org	5 org	100
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	20 dok	31 dok	20 dok	28	140	20 dok	20 dok	100
5.04.02.2.01	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Kebijakan Penyelenggaraan Pengembangan SDM	80%	80	50%		40	50%	50%	100
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS	100%	99%	100%		99	100%	100%	100
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	200 lap	119	100 lap	100	100	100 lap	240 lap	100
										100
		Nilai SAKIP	77	76,21	76,5		100,27	76,5	76,75	100
05.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja BKPSDM	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	75	100	100	100	100	100	100	100
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan BKPSDM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	5 dok	5 dok	5	100	5 dok	5 dok	100

5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja BKPSDM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 lap	4 laporan	4 lap	4	100	4 lap	4 lap	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%		100	100%	100%	100
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan BKPSDM	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%		100	100%	100%	100
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40 ob	35 ob	35 ob	3	100	35 ob	35 ob	100
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 dok	31 dok	125 dok	100	100	30 dok	30 dok	100
5.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 dok	3 dok	3 dok	36	100	3 dok	3 dok	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100 %	100%		100%	100%	100%	100
5.03.01.2.03	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD	5 lap	5 Laporan	5 lap	100	100	5 lap	5 lap	100
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Milik Daerah pada SKPD	36 lap	3 lap	36 lap	36	100	36 lap	36 lap	100
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian BKPSDM	Rata-rata capaian SKP	baik	baik	baik	100	100	baik	baik	100
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 org	3 orang	2 org	3	150	2 org	2 org	100
5.03.01.2.06	Administrasi Umum BKPSDM	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 bln	12 bln	12 bln		100	12 bln	12 bln	100
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1	100	1 paket	1 paket	100
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	7 paket	7 Paket	7 paket	7	100	7 paket	7 paket	100

5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	12	100	1 paket	1 paket	100
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	10 Laporan	13 Laporan	10 Laporan	7	70	10 Laporan	10 Laporan	100
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	7 Laporan	5 Laporan	15	250	5 Laporan	5 Laporan	100
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dok	3 dok	3 dok	2	100	3 dok	3 dok	100
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya kebutuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	-	-	1	100	-	-	100
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-	100
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bln	12 bln	12 bln		100	12 bln	12 bln	100
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27 Laporan	27 Laporan	27 Laporan	1	0,05	27 Laporan	27 Laporan	100
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	4	100	5 Laporan	5 Laporan	100
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Laporan	3 Laporan	5 Laporan	3	100	5 Laporan	5 Laporan	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	11%	50 %	10%		500%	10%	10%	100
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bln	12 bln	12 bln		100%	12 bln	12 bln	100

5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit	21 unit	23 unit	21	100	23 unit	23 unit	100
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 unit	8 unit	8 unit	40	100	8 unit	8 unit	100
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1	100	1 unit	1 unit	100

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan beberapa hal yaitu :

1. Program yang memenuhi target kinerja adalah Program Kepegawaian Daerah yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan Sebagai Berikut :

- Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi kepegawaian ASN;
- Mutasi dan Promosi ASN;
- Pengembangan Kompetensi ASN;
- Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Pemenuhan target tersebut juga dibuktikan dengan telah diberikan kenaikan pangkat kepada 1005 orang PNS, fasilitasi pengurusan pensiun sebanyak 359 PNS, fasilitasi pelaksanaan diklat sebanyak 17 PNS, Fasilitasi Pengadaan PPPK Paruh Waktu sebanyak 2836 orang, pelaksanaan Profiling ASN sebanyak 423 ASN, dan Assessment Seleksi Terbuka JPT terhadap 34 Peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Secara umum BKPSDM Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan kepegawaian. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis telah berjalan dengan baik.. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2025, dapat kami uraikan analisis kinerja BKPSDM Kabupaten Purbalingga digunakan untuk mengukur/memperkirakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2027. Adapun capaian indikator pada tahun 2025 berdasarkan target renstra dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.3
REKAPITULASI PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Profesionalitas ASN			78	80	81	81,5	79,	81,11	81,5	82	
2	Indeks Penerapan Merit System			0,50	0,55	0,64	0,65	0,63	0,73	0,65	0,64	
3	Nilai Kematangan Perangkat Daerah			43	44	45	-	44	46	-	-	
4	Nilai SAKIP BKPSDM			69,32	76	76,5	76,75	76,21	76,22	76,75	77	
5	Indeks Kualifikasi merit sistem , aspek perencanaan, pengadaan dan sistem informasi			0,1	0,14	0,17	0,169	0,169	0,190	0,169	0,182	
6	Indeks Kualifikasi merit sistem, aspek mutasi, rotasi, promosi			0,04	0,06	0,06	0,065	0,06	0,073	0,065	0,071	
7	Indeks Kinerja merit sistem, aspek manajemen kinerja dan Indeks Disiplin, aspek penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan			0,13	0,16	0,19	0,22	0,21	0,248	0,22	0,238	

8	Indeks Kompetensi merit sistem, aspek pengembangan karir			0,12	0,09	0,22	0,195	0,195	0,219	0,195	0,21	
9	Jumlah nilai merit sistem aspek perencanaan, pengadaan dan sistem informasi			44	57	67	69		92	57	67	
10	Jumlah nilai merit system aspek mutasi, rotasi, promosi			17	22	28	27		32,5	22	28	
10	Jumlah Nilai merit system aspek pengembangan karir			51	64	77	79		77,5	64	77	
11	Jumlah nilai merit system aspek manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan			58	74	88	90		95	74	88	

Dari table di atas dapat dijabarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Th 2025

Nilai Indeks Profesionalitas ASN untuk Tahun 2025 adalah 81,11 dengan kategori tinggi, belum optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- a. Belum semua pejabat struktural melaksanakan diklat kepemimpinan;
- b. Masih ada ASN yang belum maksimal dalam menggunakan aplikasi ekinerja;
- c. Banyaknya PNS jabatan pelaksana yang belum melaksanakan pengembangan kompetensi 20 JP;
- d. Kurangnya minat PNS untuk meningkatkan pendidikannya;

Untuk mendukung pencapaian peningkatan IP ASN Tahun 2026 berikut ini adalah beberapa kegiatan strategis yang sudah dilakukan yaitu :

- a. Memaksimalkan pengukuran dimensi kinerja dengan menginput nilai SKP semua PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan pengaplikasian e kinerja BKN;
- b. Membuat surat permintaan data pengembangan kompetensi secara berkala kepada semua Perangkat Daerah/Unit Kerja;

2. Penerapan Merit Sistem

Nilai Indeks Implementasi Merit Sistem untuk Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra BKPSDM Purbalingga Tahun 2021-2026 tetapi masih kendala antara lain:

- a. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian;
- b. Belum melaksanakan pemetaan kompetensi bagi seluruh pegawai;
- c. Belum optimalnya pembangunan Manajemen Talenta

2.3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi BKPSDM

Berikut beberapa isu strategis yang menjadi fokus BKPSDM dalam Renja 2027 yaitu untuk melaksanakan manajemen ASN berbasis meritokrasi:

1. Perbedaan Aspek Penilaian Merit Sistem model lama dan model baru;
2. Pemenuhan dimensi kompetensi ASN yang antara lain pejabat struktural yang belum mengikuti diklat PIM;
3. Belum semua ASN memenuhi pengembangan kompetensi 20 Jam pelajaran tiap tahun;
4. Belum semua OPD melaksanakan coaching dan mentoring;
5. Belum optimalnya Sistem Informasi layanan administrasi kepegawaian;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Tahun 2027 merupakan tahun kedua RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang difokuskan pada tema pembangunan yaitu “**Akselerasi Infrastruktur Dasar dan Pariwisata Berkelanjutan Untuk Mendorong Pemerataan Ekonomi dan Ketahanan Sosial**”. Infrastruktur dasar masih menjadi fokus pembangunan di tahun 2027. Prioritas kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi BKPSDM terkait dengan tema pembangunan tersebut adalah Peningkatan Birokrasi yang Prima dan Berintegritas, dengan fokus pada:

- 1) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur sebagai upaya mendorong pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel;
- 2) Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pendapatan daerah serta optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah

Terkait dengan program prioritas tersebut di atas dan telaahan terhadap RKPD hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan target Renstra BKPSDM Kabupaten Purbalingga yang dicapai oleh BKPSDM Kabupaten Purbalingga, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk BKPSDM berdasarkan RKPD. Review terhadap RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk BKPSDM, Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2027. Pada RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2027, anggaran belanja yang dialokasi untuk BKPSDM Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 7.009.648.000,- yang terbagi dalam 3 program 13 kegiatan, Sedangkan rencana anggaran belanja BKPSDM Kabupaten Purbalingga Tahun 2027 sebesar Rp. 8.221.535.000,- yang terbagi dalam 3 program 13 kegiatan Secara rinci review terhadap RKPD tersaji dalam tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4 Review Terhadap Ranwal RKPD Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01	Urusan Kepegawaian				7.009.648.000	Urusan Kepegawaian				8. 221.535.000
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Pbg		12 bulan	5.782.838.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Pbg		12 bulan	5.782.838.000
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	31.500.000	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	31.500.000
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	6.000.000
4.01.01.2.01.07	Evaluasi KinerjaPerangkatDaerah	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	25.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	25.500.000
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan	Kab. Pbg	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	5.187.576.000	Administrasi Keuangan	Kab. Pbg	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	5.187.576.000
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pbg	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 OB	5.028.631.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pbg	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 OB	5.028.631.000

4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	65.245.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	125 Dokumen	65.245.000
4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 dokumen	93.700.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 dokumen	93.700.000
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Prosentase terpenuhinya permintaan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang tersusun	100%	8.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Prosentase terpenuhinya permintaan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang tersusun	100%	8.000.000
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	8.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	8.000.000
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Rata rata capaian SKP	87	75.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Rata rata capaian SKP	87	75.000.000
					25.000.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi	Kab. Pbg	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	25.000.000
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi	Kab. Pbg	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	45 orang	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pbg	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	45 orang	50.000.000

			Pendidikan dan Pelatihan					Peraturan perundang-undangan		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 bulan	128.133.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 bulan	128.133.000
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pbg	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.334.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pbg	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	4.334.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pbg	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor	5 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pbg	Jumlah Paket dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	50.000.000
.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pbg	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	56.339.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pbg	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	56.339.000
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	3.000.000
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	4.937.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	4.937.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	2.717.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	2.717.000

4.01.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 Dokumen	7.200.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 Dokumen	7.200.000
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pbg	Prosentase tercukupinya kebutuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pbg	Prosentase tercukupinya kebutuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	50.000.000
4.01.01.2.07.06	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya (pengadaan aset non kendaraan didalamnya jaringan internet)	Kab. Pbg	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	50.000.000	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya (pengadaan aset non kendaraan didalamnya jaringan internet)	Kab. Pbg	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.000.000
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pbg	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	198.480.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pbg	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	198.480.000
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	540.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27 Laporan	540.000
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	104.940.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	104.940.000
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	17.400.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	17.400.000

4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	75.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	75.600.000
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pbg	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	104.149.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pbg	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	104.149.000
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan	Kab. Pbg	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	96.779.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan	Kab. Pbg	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	96.779.000
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Pbg	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	5.370.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Pbg	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	5.370.000
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pbg	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pbg	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yG Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000
5.03	KEPEGAWAIAN				2.353.785.000	KEPEGAWAIAN				2.353.785.000
5.03.02	KEPEGAWAIAN DAERAH	Kab. Pbg	Indeks Kualifikasi merit system, aspek perencanaan, pengadaan, sistem informasi	0,10	2.353.785.000	KEPEGAWAIAN DAERAH	Kab. Pbg	Indeks Kualifikasi	0,16	2.353.785.000
			Indeks Kualifikasi merit system, aspek	0,04				Indeks Kualifikasi	0,06	

			mutasi, rotasi, promosi							
			Indeks Kompetensi merit system, aspek pengembangan karir	0,13				Indeks Kinerja dan Indeks Disiplin	0,21	
			Indeks Kinerja dan Indeks Disiplin merit system, aspek manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan	0,12				Indeks Kompetensi	0,19	
5.03.02.2. 01	Pengadaan, Pemberhentian dan Infomasi Kepegawaian ASN	Kab. Pbg	Jumlah nilai merit system aspek perencanaan, pengadaan, sistem informasi	44	1.302.554.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Infomasi Kepegawaian ASN	Kab. Pbg	Jumlah nilai merit system aspek perencanaan, pengadaan, sistem informasi	44	1.302.554.000
5.03.02.2.0 1.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dok	111.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	111.000.000
5.03.02.2.0 1.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	15 Dok	872.068.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	500 orang	872.068.000
5.03.02.2. 01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan	400 Dok	30.083.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan	100%	30.083.000

			Administrasi Pemberhentian					Administrasi Pemberhentian		
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dok	49.500.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 dokumen	49.500.000
	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		9.500.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2000 dokumen	9.500.000
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Kab. Pbg	Jumlah nilai merit system aspek mutasi, rotasi, promosi	17	309.941.000	Mutasi dan Promosi ASN	Kab. Pbg	Jumlah nilai merit system aspek mutasi, rotasi, promosi	17	509.941.000
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1000 Dok	85.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	300 ASN	285.000.000
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Pbg	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1600 Dok	39.941.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Pbg	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 ASN	39.941.000
	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	50 dokumen	185.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	50 dokumen	185.000.000
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Pbg	nilai merit system aspek pengembangan karir	54	834.043.000	Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Pbg	nilai merit system aspek pengembangan karir	54	634.043.000

5.03.02.2.0 3.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 orang	125.365.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 orang	125.365.000
5.03.02.2.0 3.02	Pengelolaan Assesment Center	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	444 Dok	96.000.000	Pengelolaan Assesment Center	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	44 dok	96.000.000
5.03.02.2. 03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	4 orang	31.018.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 orang	31.018.000
5.03.02.2. 03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	719 Dok	524.660.000	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	17 Dok	324.660.000
5.03.02.2. 03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	398 Laporan	2.000.000	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	719 Laporan	2.000.000
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	300 org	55.000.000	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	300 orang	55.000.000
5.03.02.2. 04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Pbg	Jumlah nilai merit system aspek manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan	61	137.650.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Pbg	Jumlah nilai merit system aspek manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan	61	137.650.000
5.03.02.2. 04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	61.250.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	61.250.000

5.03.02.2.04.04	Pengelolaan pemberian Penghargaan bagi ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	656 Orang	50.000.000	Pengelolaan pemberian Penghargaan bagi ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	656 Orang	50.000.000
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5 Orang	20.400.000	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5 Orang	20.400.000
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	20 Dokumen	6.000.000	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	20 Dokumen	6.000.000
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Kab. Pbg			84.912.000	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Kab. Pbg			84.912.000
5.04.02	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kab. Pbg	Cakupan Kebijakan Penyelenggaraan Pengembangan SDM	80%	84.912.000	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kab. Pbg	Cakupan Kebijakan Penyelenggaraan Pengembangan SDM	80%	84.912.000
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS	100%	84.912.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS	100%	84.912.000
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	120 laporan	84.912.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	198 laporan	84.912.000

Dari Tabel diatas rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD hal ini dikarenakan penyesuaian dengan kebutuhan yang ada di BKPSDM Kabupaten Purbalingga dan peraturan kepegawaian yang sangat dinamis pasca diterbitkannya UU ASN yang baru

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Purbalingga. Program dan kegiatan di BKPSDM Kabupaten Purbalingga tidak ada yang berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan BKPSDM, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada BKPSDM maupun berdasarkan hasil pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Republik Indonesia Tahun 2025-2029 Pembangunan nasional ke depan akan berpedoman pada RPJMN 2025- 2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dan disusun berdasarkan RPJP Nasional 2025- 2045. RPJMN 2025–2029 menetapkan delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Salah satu prioritas utama adalah Asta Cita ke-7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dalam hal memperkuat reformasi birokrasi ini mencakup penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 7 pada RPJMN 2025-2029 arah kebijakan yang dilaksanakan melalui Penerapan Prinsip meritokrasi dan reformasi Manajemen ASN.

Penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara sesuai prinsip meritokrasi melalui Kegiatan Prioritas berikut ini :

- 1) Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja aparatur sipil negara,
- 2) Penguatan sistem manajemen talenta aparatur sipil negara,
- 3) Penerapan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang mendorong kemudahan akses belajar,
- 4) Digitalisasi manajemen aparatur sipil negara,
- 5) Penerapan budaya kerja yang mendorong peningkatan integritas aparatur sipil negara, serta
- 6) Penerapan dan evaluasi kebijakan manajemen aparatur sipil negara

Sejalan dengan prioritas BKN dalam rangka penerapan meritokrasi dan reformasi Manajemen ASN, BKPSDM Kabupaten Purbalingga pada tahun 2027 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Implementasi Manajemen Talenta;
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian;
- 3) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja ASN;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah “ MEWUJUDKAN PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA”. Purbalingga yang Mandiri dapat diartikan bahwa Kabupaten Purbalingga mampu sejajar dengan daerah lain mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga dapat bersaing dengan sehat melalui optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, Perekonomian Kabupaten Purbalingga diharapkan menjadi tangguh untuk tumbuh dan bersaing dengan daerah lain terutama di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Purbalingga yang Sejahtera diarahkan untuk mewujudkan Pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pelayanan dasar bagi masyarakat sebagai subjek pembangunan baik dalam pendidikan; kesehatan; perlindungan sosial; ketenteraman, ketertiban umum masyarakat serta ketahanan sosial budaya dan keluarga yang layak dan berkualitas. Hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat baik berdasarkan gender, suku/ras, agama maupun tingkat pendapatan sehingga memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Untuk mengukur pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga selama tahun 2025-2029 digunakan indikator kinerja; Pendapatan Perkapita (ADHB), Angka Kemiskinan, Penurunan Emisi GRK Kumulatif, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Reformasi Birokrasi, Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut, ditetapkan Sasaran Pembangunan Daerah yang akan diwujudkan sebagai berikut:

Sasaran 1: Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Inklusif

Dalam rangka mewujudkan tujuan daerah, sasaran pertama yang ingin diwujudkan adalah perekonomian yang maju dan merata sebagai bagian dari misi Bangkitkan Ekonomi Rakyat yang diukur dengan Indikator kinerja: Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio), Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Ketahanan Pangan

Sasaran 2: Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas

Pencapaian sasaran pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan diarahkan pada peningkatan infrastruktur yang berkualitas dengan tolak ukur keberhasilan Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah.

Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi Prima dan Berintegritas

Sasaran pembangunan daerah ini diarahkan untuk peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tatakelola pemerintahan yang bersih dan transparan diwujudkan melalui dukungan aparatur pemerintahan yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif,

struktur organisasi yang efisien, serta sikap dan perilaku aparatur yang baik. Sedangkan responsif diwujudkan melalui pelibatan kontribusi serta perkuatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan ini diukur dengan Indikator Kinerja; Nilai SAKIP, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Integritas Nasional.

Tujuan BKPSDM Kabupaten Purbalingga merupakan penjabaran dari Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 pada sasaran ke tiga, yakni Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas, dan untuk mendukung sasaran tersebut maka BKPSDM ambil bagian dalam pengelolaan SDM Aparatur melalui system merit yaitu untuk mewujudkan ASN yang Profesional dan kompeten. Sehingga tujuan BKPSDM adalah: "Terwujudnya profesionalitas ASN" Dengan Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN.

Sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian, dan Pengembangan sumber daya Manusia Kabupaten Purbalingga sesuai dengan tujuan tersebut adalah : "Terimplementasinya Merit System" dengan Indikator Kinerja Indeks Penerapan Sistem Merit ASN serta Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BKPSDM dengan

3.3 Program dan Kegiatan BKPSDM

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,

1) Arah Kebijakan RKPD 2027

Dalam Rancangan RKPD Tahun 2027 Terdapat 6 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga yaitu

1. Peningkatan Perekonomian yang Maju dan Inklusif
2. Peningkatan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas
3. Peningkatan Birokrasi yang Prima dan Berintegritas;
4. Peningkatan Kualitas Manusia yang Unggul;

Keterkaitan BKPSDM dengan Rancangan RKPD Tahun 2027 adalah Program Prioritas Kabupaten Yang ke 3 yaitu Peningkatan Birokrasi yang Prima dan Berintegritas.

Dengan demikian focus BKPSDM dalam penyusunan Renja 2027 adalah Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian, Optimalisasi Penilaian Sistem Merit dan Implementasi Manajemen Talenta

2) Jumlah program dan jumlah kegiatan

Renja 2027 terdapat 3 Program dan 13 Kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

- b. Program Kepegawaian Daerah dilaksanakan oleh 4 bidang dengan perincian :
- Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi oleh Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi
 - Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN oleh Bidang Mutasi dan Promosi
 - Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN oleh bidang pengembangan kompetensi Aparatur
 - Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur oleh bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
- c. Program Pengembangan SDM terdiri dari Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan dan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional oleh Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

4.1. Program dan Kegiatan

4.1.1. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu BKPSDM dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, tentunya dalam pelaksanaan program dan kegiatan harus sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari SKPD bersangkutan. Selain itu Program juga merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana yang merupakan penjabaran rinci tentang langkah- langkah yang diambil dalam melaksanakan kebijakan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam program-program kegiatan yang terdiri 3 (tiga) program sebagai berikut:

- 4.1.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 4.1.1.2. Program Kepegawaian Daerah;
- 4.1.1.3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

4.1.2. Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Guna memperlancar pelaksanaan program dan sasaran tersebut diatas, maka dilaksanakan kegiatan-kegiatan, yaitu :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Kepegawaian Daerah :

- a. Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN;
- b. Mutasi dan Promosi ASN;
- c. Pengembangan Kompetensi ASN;
- d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia :

- a. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Secara rinci program dan kegiatan Rencana Kerja 2027 tersaji dalam matrik di bawah ini :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Purbalingga
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jenis Belanja		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.000)
						BL	B. Pegawai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)
		BKPSDM			1.855.598.000	5.028.631.000				7.572.651.900
5	5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			1.855.598.000	5.028.631.000	DAU			7.572.651.900
5	5.03	KEPEGAWAIAN			1.608.168.000	5.028.631.000				7.325.089.200
5	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			423.545.000	5.028.631.000				5.933.825.700
5	5.03.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			31.500.000	-				3.850.000
5	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	BKPSDM	5 dok	6.000.000				1.650.000
5	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	BKPSDM	4 lap	25.500.000				2.200.000
5	5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan	Prosentase Temuan pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	BKPSDM		158.945.000	5.028.631.000			5.706.333.600

5	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	BKPSDM	44 Org/bl		5.028.631.000			5.028.631.000	5.421.309.300
5	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKPSDM	125 dok	65.245.000				65.245.000	49.500.000
5	5 03 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	BKPSDM	3 dokumen	93.700.000					103.070.000
5	5 03 01 2.03	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD pada SKPD	BKPSDM	36 lap	8.000.000					8.800.000
5	5 03 01 2.03 0006	Penatausahaan BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD	BKPSDM	36 lap	8.000.000					8.800.000
5	5 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian	Rata-Rata Nilai SKP	BKPSDM		75.000.000	-				82.500.000
5	5 03 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Diklat	BKPSDM	5 orang	50.000.000					55.000.000
		Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	50 orang	25.000.000					27.500.000
5	5 03 01 2.06	Administrasi Umum		BKPSDM		78.133.000					85.946.300
5	5 03 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	BKPSDM	7 paket	4.334.000					4.767.400
5	5 03 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang disediakan	BKPSDM	7 paket	56.339.000					61.972.900
5	5 03 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	BKPSDM	12 dokumen	3.000.000					3.300.000
5	5 03 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM	15 laporan	4.937.000					5.430.700

5	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	5 laporan	2.717.000						2.988.700
5	5	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	BKPSDM	36 Dokumen	7.200.000						7.920.000
5	5	03	01.	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.000.000						110.000.000
5	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang disediakan	BKPSDM	8 unit	100.000.000						110.000.000
5	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		BKPSDM		198.480.000						218.328.000
5	5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	BKPSDM	27 laporan	415.000						456.500
5	5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	BKPSDM	36 laporan	104.000.000						114.400.000
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	1 Laporan	17.400.000						19.140.000
5	5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	BKPSDM	36 laporan	75.600.000						83.160.000
5	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		BKPSDM		104.149.000						114.563.900
5	5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	BKPSDM	23 unit	96.779.000						106.456.900

5	5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	BKPSDM	40 unit	5.370.000					5.907.000
5	5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedng Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	BKPSDM	1 unit	2.000.000					2.200.000
5						KEPEGAWAIAN		BKPSDM		2.353.785.000		2.299.657.000			2.589.163.500
5						KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kualifikasi merit system, Aspek Perencanaan, Pengadaan, sistem informasi	BKPSDM		2.353.785.000					2.589.163.500
5	5	03	02	2,01		Pengadaan, Pemberhentian dan Infomasi Kepegawaian ASN	Jumlah Nilai Merit sistem aspek perencanaan, pengadaan, sistem informasi	BKPSDM	47	1.302.554.000	-				1.432.809.400
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM	8 orang	211.000.000					232.100.000
5	5	03	02	2.01	0003	koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen hasil kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	500 org	772.068.000					849.274.800
5	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	300 dok	30.083.000					33.091.300
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	4 dok	59.000.000					64.900.000
5	5	03	02	2,02		Mutasi dan Promosi ASN	jumlah nilai merit sistem aspek mutasi, rotasi, promosi	BKPSDM	18	509.941.000					560.935.100

5	5	03	02	2,02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	BKPSDM	300 dok	285.000.000						313.500.000
5	5	03	02	2,02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	800 dok	39.941.000						43.935.100
	5	03	02	2,02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	BKPSDM	50 dok	185.000.000						203.500.000
5	5	03	02	2,03		Pengembangan Kompetensi ASN	jumlah nilai merit sistem aspek pengembangan karir	BKPSDM	54	634.043.000	-					697.447.300
5	5	03	02	2,03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	BKPSDM	2 org	125.365.000						137.901.500
5	5	03	02	2,03	02	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah dokumen pengelolaan <i>Assesment Center</i>	BKPSDM	44 dok	96.000.000						105.600.000
5	5	03	02	2,03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	5 org	31.018.000						34.119.800
5	5	03	02	2,03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	BKPSDM	17 dok	324.660.000						357.126.000
5	5	03	02	2,03	07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	jumlah laporan hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	BKPSDM	1 laporan	2.000.000						2.200.000
5	5	03	02	2,03	013	Pembinaan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN fungsional yang dibina	BKPSDM	300 orang	55.000.000						60.500.000
5	5	03	02	2,04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah nilai merit sistem aspek manajemen kinerja, Penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan	BKPSDM	61	137.650.000	-					151.415.000

5	5	03	02	2,04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	BKPSDM	50 dok	31.250.000						34.375.000
5	5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	BKPSDM	1 org	80.000.000						88.000.000
5	5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	BKPSDM	10 org	20.400.000						22.440.000
5	5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin perceraian yang dilayani	BKPSDM	5 dok	6.000.000						6.600.000
5	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		BKPSDM		84.912.000	-					93.403.200
						PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan Kebijakan Penyelenggaraan Pengembangan SDM	BKPSDM	1	84.912.000	-					93.403.200
5	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah peserta Latsar CPNS	BKPSDM	100%	84.912.000	-					93.403.200
5	5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, JPT, jab.fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	BKPSDM	198 laporan	84.912.000						93.403.200

BAB V

P E N U T U P

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga tahun 2027, seluruh pejabat dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Renja Tahun 2027 merupakan acuan bagi Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga dan masyarakat dalam pembangunan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Seluruh pegawai dilingkungan BKPSDM Kabupaten Purbalingga berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan yang terutang dalam Renja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya
2. Renja Tahun 2027 menjadi acuan dan pedoman bagi pejabat dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun pelayanan
3. Pada akhir tahun anggaran 2027, setiap bidang wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
4. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala bidang wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan Renja tahun 2027 akan sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak. Oleh karena itu agar kebijakan dan program yang telah dituangkan dalam Renja tahun 2027 tersebut

dapat dilaksanakan dan direalisasikan secara optimal serta dapat mencapai sasaran, oleh karena itu dukungan dari berbagai pihak sangatlah diperlukan.

Akhirnya, semoga cita-cita menggapai efisiensi kelembagaan dan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara segera dapat terwujud.

Pubalingga, 26 Januari 2026

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN PURBALINGGA



DWI MULYATNO, S. Pd., M. Kes

Pembina Tk. I

NIP. 19700426 199203 1 005